

# STRATEGI PERENCANAAN MERDEKA BELAJAR DI SMP NEGERI 3 SUNGGUMINASA

SATRIANI, BAHARUDDIN, EKA DAMAYANTI, ST. SYAMSUDDUHA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: satrianiijamal@gmail.com, bahar.baharuddin@uin-alauddin.ac.id,

eka.damayanti@uin-alauddin.ac.id, st.syamsudduha@uin-alauddin.ac.id

## (Article History)

Received May 26, 2023; Revised June 21, 2024; Accepted Juni 25, 2024

### **Abstract: Planning Strategy Merdeka Belajar at SMP Negeri 3 Sungguminasa**

The independent learning program in secondary education is a program that must be implemented. However, not all schools can fully implement it because they are still looking for the right model. Therefore, there must be research that can be a best practice for other schools. This study aims to describe the planning of the independent learning program in the National Assessment activities, the simplified Learning Implementation Plan (RPP) activities, and the zoning system activities on the New Student Admission (PPDB) at SMP Negeri 3 Sungguminasa. This research is a type of descriptive qualitative research. Data were collected using interviews, observation, and documentation techniques. Data analysis used descriptive analysis techniques from Miles and Huberman through data reduction, data presentation, and conclusion. Test the validity of the data using extended observations, increasing persistence in research and triangulation techniques. The results of this study indicate that the planning of the independent learning program (in National Assessment activities, simplified RPP activities, and zoning system activities on PPDB at SMP Negeri 3 Sungguminasa has been running based on planning indicators, namely: (1) Determination of goals and objectives (2) Determine the resources used (3) Select and determine the method or method to be carried out. The findings imply that the school should be able to implement the independent learning policy not only in good planning but starting from implementation, and control, to the evaluation stage.

**Keywords:** Planning Strategy, Merdeka Belajar, National Assessment, Learning Implementation Plan, Zoning System

### **Abstrak: Strategi Perencanaan Merdeka Belajar di SMP Negeri 3 Sungguminasa**

Program merdeka belajar pada pendidikan menengah menjadi program yang harus dilaksanakan namun belum semua sekolah dapat menerapkan secara penuh karena masih mencari model yang tepat. Penting ada penelitian yang dapat menjadi *best practice* bagi sekolah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan program merdeka belajar pada kegiatan asesmen nasional, kegiatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disederhanakan, dan kegiatan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Sungguminasa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan teknik

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dari Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian dan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program merdeka belajar pada kegiatan asesmen nasional, kegiatan RPP yang disederhanakan, dan kegiatan sistem zonasi pada PPDB di SMP Negeri 3 Sungguminasa sudah berjalan didasarkan pada indikator perencanaan yaitu: (1) penentuan sasaran dan tujuan (2) menetapkan sumber-sumber daya yang digunakan (3) memilih dan menetapkan metode atau cara yang akan dilakukan. Hasil temuan mengimplikasikan pihak sekolah untuk dapat menerapkan kebijakan merdeka belajar bukan hanya pada perencanaan yang baik saja tapi juga pelaksanaan, pengontrolan, sampai pada tahap evaluasi.

**Kata Kunci:** Strategi Perencanaan, Merdeka Belajar, Asesmen Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Sistem Zonasi

## PENDAHULUAN

Pendidikan era revolusi 4.0 menuntut adaptasi yang cepat dan tepat agar dapat berakselerasi dengan perkembangan zaman yang semakin drastis berubah. Dunia pendidikan diharuskan menciptakan peluang-peluang baru dengan kreatif dan juga inovatif. Oleh karena itu Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat gebrakan baru dengan kehadiran program merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan untuk menyikapi pergerakan dan perubahan pendidikan di era revolusi industri 4.0 (Lukum, 2019).

Posisi guru dalam pendidikan formal sangat besar karena bertanggung jawab dalam membina peserta didik agar dewasa, berani, mandiri dan berusaha sendiri. Guru sebagai pendidik seharusnya mengupayakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis serta mandiri dalam menemukan jati dirinya. Berdasarkan hal tersebut, guru bukan hanya memberikan pengetahuan tetap juga mendorong agar peserta didik dapat memiliki kekuatan dalam bernalar. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik agar mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran serta transfer keilmuan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subjek utama bukan hanya sekedar objek dari sebuah proses pendidikan (Mustaghfiroh, 2020). Peserta didik dapat menjadi subjek belajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menjadi pemeran utama dalam proses belajar (Sanjaya, 2008). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 044/H/KR/2022 yang ditandatangani 12 Juli 2022 ditetapkan lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. SK tersebut merevisi SK sebelumnya karena terdapat

perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan mengubah level implementasinya (PUSMENDIK, 2022)

Fakta menunjukkan belum semua sekolah mampu menerapkan program merdeka belajar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan merdeka belajar. Menurut Revina (dalam Insani, 2022), alasan guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar disebabkan karena cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah yang tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi peserta didik, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan.

Kendala lain yang menghambat penerapan merdeka belajar meliputi keterbatasan referensi, akses pembelajaran, manajemen waktu, dan keterampilan yang memadai (Insani, 2022). Guru, sebagai ujung tombak perubahan tersebut, harus siap mengambil berbagai tindakan dan berani untuk belajar serta mencoba hal-hal baru. Hal ini diperlukan agar mereka tidak hanya dapat beradaptasi, tetapi juga mampu mempersiapkan peserta didik sebagai generasi bangsa yang dapat menghadapi tantangan di masa depan.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan (Putriani & Hudaidah, 2021) khususnya rencana pelaksanaan dan penerapan merdeka belajar hendaknya dipersiapkan dengan baik. Perencanaan menjadi penentu dan penunjuk arah terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Nursobah, 2019). Perencanaan dijadikan perhatian utama oleh para pengelola lembaga sebab perencanaan merupakan bagian awal yang menentukan kesuksesan. Kesalahan dalam merancang perencanaan dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan suatu lembaga (Kurniawan, 2015). Perencanaan pada sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yaitu merdeka belajar hendaknya menjadi perhatian khusus di setiap sekolah yang akan menerapkan kebijakan baru tersebut. Ini akan menjadi tugas yang baru untuk sekolah bagaimana bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam penerapan kebijakan baru yaitu merdeka belajar.

Satuan pendidikan SMP Negeri 3 Sungguminasa telah melaksanakan perencanaan implementasi merdeka belajar, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan beberapa kebijakan merdeka belajar. Sarana dan prasarana di sekolah ini dinilai memadai untuk mendukung program merdeka belajar, karena pengelolaan, pemanfaatan, dan fungsinya telah sesuai dengan harapan sekolah (berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti). Peneliti menyimpulkan bahwa manajemen perencanaan di sekolah harus menjadi langkah awal dalam penerapan kebijakan baru dari Kemendikbud RI. Oleh karena itu,

artikel ini penting untuk mendeskripsikan perencanaan yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 3 Sungguminasa dalam penerapan merdeka belajar pada kegiatan asesmen nasional, RPP yang disederhanakan, dan sistem zonasi pada PPDB.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi manajemen perencanaan yang terjadi di SMP Negeri 3 Sungguminasa. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui sumber yang pertama baik dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada informan antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan tenaga pendidik. Informan dipilih karena sesuai dengan fokus dan karakteristik penelitian. Data sekunder merupakan jenis sumber data penelitian yang diperoleh atau didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara berupa dokumen perencanaan merdeka belajar, foto atau buku atau arsip yang mendukung data penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi diolah dalam bentuk narasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif model Miles dan Huberman yang melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data berupa memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Program Merdeka Belajar pada Kegiatan Asesmen Nasional di SMP Negeri 3 Sungguminasa**

Penentuan tujuan pada program merdeka belajar pada kegiatan asesmen nasional di SMP Negeri 3 Sungguminasa yang menetapkan tujuan untuk menciptakan Pendidikan karakter dengan berdasar pada Pancasila dan melihat kemajuan atau progres dari peserta didik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Penentuan tujuan ini sejalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Hariyanto, 2022). Dalam menentukan suatu tujuan haruslah jelas dan spesifik, dengan menentukan tujuan secara jelas maka akan membawa organisasi pada tingkat pencapaian yang lebih tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan bahwa asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem Pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Asesmen nasional dalam Permendikbud Ristek 17 tahun 2021 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memetakan dan meningkatkan mutu sistem pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendorong

pembelajaran yang mengembangkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan asesmen nasional secara berkala untuk memastikan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan (Jogloabang, 2021). Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar non kognitif dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Dalam hal ini sekolah menetapkan tujuan dengan memperhatikan segala bentuk peraturan yang sedang berlaku. Menurut *Rokhim et al.* (2021) asesmen dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Penentuan sumber daya yang digunakan di SMP Negeri 3 Sungguminasa dalam penerapan merdeka belajar pada kegiatan asesmen nasional melibatkan berbagai komponen penting. Pelaksana kegiatan ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi tugas khusus, seperti proktor, teknisi, dan pengawas, yang diorganisasi oleh sekolah sebagai organisasi penggerak. Instrumen yang digunakan mencakup alat asesmen nasional, lembar penilaian, dan bahan rujukan terkait pendanaan diperoleh dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peralatan yang digunakan meliputi komputer, jaringan internet, serta prasarana pendukung lainnya seperti ruang kelas atau gedung. Menurut Astini (2022), dalam penerapan merdeka belajar, sekolah harus meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung, serta memastikan guru memiliki keterampilan dalam teknologi informasi dan berbagai aplikasi pendidikan.

Pelaksanaan asesmen tidak hanya berbicara pada hasil belajarnya saja, tetapi juga berbicara tentang apa yang diterima oleh peserta didik dan bagaimana bentuk prosesnya sehingga tujuan dalam asesmen dapat terlaksana (Kemdikbud, 2021). Dalam temuan pada penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan asesmen nasional terjadi dalam beberapa tahapan di antaranya sosialisasi kepada pendidik, peserta didik, dan orang tua terkait kebijakan asesmen nasional dan teknik pelaksanaannya, verifikasi data calon peserta, menetapkan ruang asesmen, mengikuti simulasi asesmen nasional, mengikuti gladi bersih yang mengikutsertakan peserta didik yang terpilih sebagai sampel, menyampaikan kepada orang tua peserta didik terkait keikutsertaan peserta didik, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional kepada pelaksana tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Temuan yang peneliti temukan sesuai dengan penelitian Indahri (2021) bahwa asesmen terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

#### **Perencanaan Program Merdeka Belajar pada Kegiatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disederhanakan di SMP Negeri 3 Sungguminasa**

Tujuan penerapan kegiatan RPP yang disederhanakan adalah untuk mempermudah guru dalam merancang atau menyusun RPP, terutama pasca pandemi yang melanda seluruh negara (Luthfiyana et al., 2022). RPP yang awalnya

terdiri dari 13 komponen kini disederhanakan menjadi 3 komponen utama yang mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan guru untuk memilih dan menyusun format RPP secara mandiri (Rahman *et al.*, 2021). Implementasi kebijakan penyederhanaan RPP ini memerlukan kesiapan dari berbagai komponen, termasuk sekolah. Sekolah dan guru sebagai subjek utama kebijakan ini harus siap karena guru terlibat langsung dalam penyusunan RPP sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Rahman *et al.*, 2021).

Sumber daya yang paling dibutuhkan dalam penyusunan RPP adalah guru. Guru merupakan penyusun dari RPP. Bahan (*materials*) yang digunakan dalam penyusunan RPP adalah bahan kajian RPP, referensi RPP dan kertas yang digunakan untuk mencetak RPP. Adapun alat (*machines*) yang digunakan berupa laptop dan juga printer. Dana yang digunakan dalam penyusunannya berupa dana dari masing-masing tenaga pendidik sebagai pelaksananya. Salah satu peranan guru dalam dunia pendidikan adalah sebagai perencana atau RPP. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arifin (2020) bahwa salah satu peranan guru dalam dunia pendidikan adalah sebagai perencana atau penyusun RPP. Tugas seorang guru adalah menguasai dan mengembangkan berbagai materi pelajaran, menyusun dan merencanakan pelajaran sehari-hari serta mengontrol dan mengevaluasi peserta didik. Dalam proses merencanakan atau menyusun RPP guru harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga pembelajaran menjadi baik dan potensi dari peserta didik bisa ditingkatkan. Penyusunan RPP, guru yang menjadi tim penggerak atau pelaksana diberikan pelatihan terkait penyusunan RPP ini (Ruhaliyah *et al.*, 2020). Dalam pelatihan tersebut diberikan pembahasan mengenai bagaimana cara yang harus dilakukan dalam penyusunan RPP. Langkah-langkah dalam penerapan kegiatan RPP yang disederhanakan berupa (1) persiapan bahan pelajaran yang terdiri dari buku guru tematik dan buku siswa tematik, (2) pembuatan kerangka RPP, dan (3) pengisian kerangka RPP.

Semua pengaturan terkait penyusunan RPP dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang ada dalam hal ini adalah Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid (Mayudana & Sukendra, 2020). Terdapat 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawaharah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid.

## **Perencanaan Program Merdeka Belajar pada Kegiatan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Sungguminasa**

Tujuan yang diterapkan pada sekolah SMP Negeri 3 Sungguminasa dalam pelaksanaan PPDB adalah untuk menjamin pemerataan pada peserta didik yang akan menempuh pendidikan. Dalam hal ini, pada penentuan sasaran atau tujuannya sudah sangat jelas untuk kegiatan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, ini dilakukan untuk menyikapi berbagai masalah pendidikan yang terjadi. Ini sejalan dengan tujuan yang dikemukakan oleh Pradewi & Rukiyati (2019) bahwa tujuan dari kebijakan sistem zonasi meliputi pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Hasim, 2020).

Penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi di SMP Negeri 3 Sungguminasa telah dilaksanakan dengan berbasis *online*. Pelaksana kegiatan PPDB sistem zonasi adalah panitia pelaksana PPDB yang dibentuk oleh sekolah, yang di dalamnya terdapat tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dalam hal bahan (*materials*) yang digunakan berupa petunjuk teknis PPDB, brosur PPDB serta situs pendaftaran PPDB. Kemudian dalam hal alat-alat yang digunakan berupa komputer, printer, jaringan internet, alat tulis kantor dan LCD. Selain itu dana yang didapatkan dari pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini sekolah terus melakukan peningkatan terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya tiap-tiap kegiatan. Menurut Syaifullah *et al.* (2020) bahwa peningkatan sarana dan prasarana dalam sekolah menjadi salah satu bentuk cara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SMP Negeri 3 Sungguminasa telah berhasil menerapkan kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi dengan tujuan utama menjamin pemerataan pendidikan. Implementasi sistem zonasi ini sejalan dengan tujuan kebijakan yaitu untuk meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB berbasis *online* di SMP Negeri 3 Sungguminasa melibatkan panitia yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan, dengan dukungan bahan dan alat seperti petunjuk teknis, brosur, situs pendaftaran, komputer, printer, jaringan internet, alat tulis kantor, dan LCD. Dana operasional berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sekolah terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB. Peningkatan infrastruktur sekolah adalah kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

## **PENUTUP/SIMPULAN**

Perencanaan kegiatan asesmen nasional, perencanaan kegiatan RPP yang disederhanakan dan perencanaan kegiatan sistem zonasi PPDB dalam program

merdeka belajar telah diterapkan dengan baik oleh SMP Negeri 3 Sungguminasa, mulai pada penetapan tujuan yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 3 Sungguminasa yaitu menciptakan pendidikan yang berkarakter dengan berpedoman pada Pancasila. Hasil temuan mengimplikasikan pihak sekolah untuk dapat menerapkan kebijakan merdeka belajar bukan hanya pada perencanaan yang baik saja tapi juga pelaksanaan, pengontrolan, sampai pada tahap evaluasi. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang praktik baik yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh sekolah lain dalam konteks yang berbeda, sehingga meningkatkan mutu pendidikan secara lebih luas. Keberhasilan SMP Negeri 3 Sungguminasa menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya pendidikan sangat penting. Sekolah lain dapat mengikuti jejak ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan untuk mendukung program-program yang berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai-nilai pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2020). Peningkatan Kemampuan Guru dalam Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 1 Halaman Melalui Workshop Daring dengan Variasi Model Jigsaw di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar (SD) Negeri Genteng 2 Bangkalan. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 3(2), 201–215. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/rejiem/article/view/4722/2597>
- Astini, N. K. S. (2022). Tantangan Implementasi Merdeka Belajar Pada Era New Normal Covid-19 dan Era Society 5.0. *Lampuhyang*, 13(1), 164–180. <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v13i1.298>
- Hariyanto, M. P. (2022). *Transformasi Asesmen Pembelajaran dalam Bingkai Merdeka Belajar*. [sekolahku.web.id. https://www.sman1manggar.sch.id/read/676/transformasi-asesmen-pembelajaran-dalam-bingkai-merdeka-belajar](https://www.sman1manggar.sch.id/read/676/transformasi-asesmen-pembelajaran-dalam-bingkai-merdeka-belajar)
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*. <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/view/403>
- Indahri, Y. (2021). Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 12(2), 195–215. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>
- Insani, M. J. (2022). *5 Kendala Guru dalam Menghadapi Program Merdeka Belajar*. Kejarcita.



- Jogloabang. (2021). *Permendikbud Ristek 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional*. [jdih.kemdikbud.co.id](http://jdih.kemdikbud.co.id).
- Kemdikbud. (2021). *Memahami Konsep Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021*. Permendikbud.
- Kurniawan, S. (2015). Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits (Studi Tentang Perencanaan). *Nur El-Islam*, 2(2), 1–34. <https://media.neliti.com/media/publications/226467-konsep-manajemen-pendidikan-islam-perspe-afe103b0.pdf>
- Lukum, A. (2019). *Pendidikan 4.0 di Era Generasi Z: Tantangan dan solusinya. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia, 2(Back Issue)*, 1–3.
- Luthfiyana, N. H., Husna, E. S., Nida, S. K., & Kinesti, R. D. A. (2022). Upaya Pemanfaatan Teknologi: Aplikasi RPP Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (Sikl)(Studi Kasus Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL)). *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(2), 84–90. <https://doi.org/10.26618/jkpd.v7i2.4699>
- Mayudana, I. K. Y., & Sukendra, I. K. (2020). Analisis Kebijakan Penyederhanaan RPP: Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. *Indonesian Journal of Educational Development*, 1(1), 62–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3760682>
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Nursobah, A. (2019). *Perencanaan Pembelajaran MI/SD (Vol. 122)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28–34.
- PUSMENDIK. (2022). *Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Implementasi Kurikulum Merdeka tetap Berjalan Sesuai Rencana*. Pusat Asesmen Pendidikan.
- Putriani, J. D., & Hudaidah, H. (2021). Penerapan Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 830–838. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.407>
- Rahman, M. S., Nurhayati, N., & Luawo, D. W. M. (2021). Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Di MTs Negeri 1 Manado. *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, 2(1), 1–21. <http://dx.doi.org/10.30984/jpai.v2i1.1708>

- Rokhim, D. A., Rahayu, B. N., Alfiah, L. N., Peni, R., Wahyudi, B., Wahyudi, A., Sutomo, S., & Widarti, H. R. (2021). Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, dan Survey Lingkungan Belajar. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 61-71. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v4i12021p61>
- Ruhaliah, R., Sudaryat, Y., Isnendes, R., & Hendrayana, D. (2020). Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran “Merdeka Belajar” Bagi Guru Bahasa Sunda di Kota Sukabumi. *Dimasatra*, 1(1), 42-55. <https://ejournal.upi.edu/index.php/dimasatra>
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*.(Cetakan Ke 1) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifullah, H., Nugroho, A. P., & Wardhiyani, B. P. (2020). KKN Online UMJ: Terobosan Pembelajaran Berbasis Online di Era Pandemi dan Relevansinya Pasca Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1). <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>